

Persepsi Penyuluh Agama tentang Konflik Berbasis Agama (Kasus Ahmadiyah dan Tijani di Kabupaten Sukabumi)

Koeswinarno

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

dan

Fakhrudin

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Abstract

The research is aimed at explaining how the religion counselor comprehend the religion-based conflicts in Parakan Salak and Jampar Tengah subdistrict in Sukabumi, West Java. Data collecting technique are through deep interview and FGD to honorary and official servant religion counselor. The result explains that the counselor has good knowledge about anything related to 'religion', but is not skilled enough in understanding people's social structure especially in early detecting social sensitivity. In dealing with a conflict, religion counselor is subordinated to the local religion figure because the counselor does not have direct assignment burden in resolving conflict, as well to the inferiority in doing the assignment is an important factor of how the position of the religion counselor in comprehending conflict is not completely optimal yet. Therefore, a model is needed to grow counselor's motivation to resolve the conflict

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana positioning Penyuluh Agama Islam dalam memahami konflik social berbasis agama di daerah di Kecamatan Parakan Salak dan Kaecamatan Jampar Tengah Kabutapen Sukabumi, Jawa Barat. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan FGD terhadap Penyuluh Agama berstatus PNS dan Honorer. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengetahuan penyuluh agama, cukup baik, khususnya yang berkaitan dengan "agama", namun tidak diikuti dengan "skill" dalam memahami struktur sosial masyarakat, terutama dalam melakukan deteksi dini kerawanan sosial. Dalam persoalan bagaimana penyuluh agama menghadapi situasi konflik tersubordinasi oleh tokoh agama local. Disamping karena tidak memiliki beban tugas langsung dalam melakukan resolusi konflik, sikap inferior dalam melakukan tugas merupakan factor penting bagaimana posisi penyuluh agama belum sepenuhnya optimal memahami konflik. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah model yang mampu menumbuhkan motivasi penyuluh dalam proses resolusi konflik.

Pendahuluan

Banyak spekulasi yang dilakukan ahli tentang masa depan Indonesia yang sebagian melihatnya sebagai negara yang terus akan menghadapi masalah sosial yang rawan. Soros (2000) menyebut Indonesia, sebagai negara yang menyerupai negara-negara Balkan yang memiliki persoalan dalam stabilitas ekonomi dan politik. Bahkan Soros melihat Indonesia merupakan versi lain dari Yugoslavia yang menghadapi persoalan etnis, agama, dan kelompok agama. Apabila pertikaian tersebut tidak mampu diatasi dengan komprehensif dan substansial, maka bayangan Soros tentu saja beralasan. Dalam beberapa tahun ini, Indonesia dihadapkan kepada konflik antar maupun internumat beragama, yang menyertakan sekelompok massa untuk menyerang sekelompok massa lainnya. Kasus Sampang (2011 dan 2012), Cikeusik (2011), Temanggung (2011), Ciketing (2010), Parakan Salak Sukabumi (2008) Tijani (2012), dan Gereja Yasmin yang berlarut-larut menunjukkan masih adanya potensi konflik berbasis agama.

Dari pertikaian semacam itu tampak bahwa Indonesia bukan sekedar sedang menghadapi persoalan perbedaan dua entitas, tetapi persoalan struktural yang jauh lebih rumit. Pertikaian antara kelompok Syiah dan Sunni di Sampang bermula terkait dengan persoalan keluarga antara Tajul dengan Rois, demikian juga dalam kasus warga Ahmadiyah di berbagai tempat dengan penduduk lokal. Namun demikian, yang lebih penting bahwa konflik ini telah terjadi dalam suatu ruang sosial politik dan ekonomi tertentu turut berkontribusi membentuk karakter konflik itu sendiri. Peneliti mengasumsikan bahwa corak sistem sosial politik dan ekonomi pada tingkat nasional telah membentuk karakter konflik pada tingkat lokal. Demikian pula halnya perubahan corak sistem sosial politik dan ekonomi yang

dipengaruhi oleh tekanan-tekanan global juga berpotensi mengubah karakter persoalan etnis yang ada pada tingkat daerah.

Di berbagai tempat dan waktu, potensi konflik selalu saja ada meskipun tingkat aktualisasi dan eskalasinya berbeda-beda. Perbedaan Sunni-Syiah, Islam-Kristen, Ahmadiyah-Non Ahmadiyah sebagai fenomena keagamaan di masa lalu tidak hanya mempengaruhi masa sekarang, tetapi juga secara berkesinambungan telah dikonstruksi kembali pada konteks masa kini. Perbedaan Sunni-Syiah, bukan hal yang penting pada masa lalu dan pada situasi tertentu perbedaan tersebut dihadirkan kembali dengan tingkat kompleksitas persoalan yang lebih tinggi (Abdullah, 2001; Sutherland, Raben, dan Locher-Scholten, 2002). Dalam konteks Indonesia, perbedaan semacam ini sesungguhnya telah ada bahkan sejak era pra kemerdekaan hingga era reformasi berlangsung. Oleh sebab itu, studi semacam ini harus terus-menerus dikaji dalam bingkai dan konteks perkembangan waktu.

Pada dasarnya persoalan konflik tersebut, bukan pengetahuan baru bagi masyarakat lokal. Terlebih bagi para pemangku kepentingan seperti Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota dan tokoh-tokoh lokal. Namun ironisnya, sejak peristiwa konflik berlangsung hingga berakhir, kita tidak pernah melihat posisi Penyuluh Agama di daerah. Tiba-tiba saja konflik kemudian "ditangani" oleh pemerintah pusat melalui berbagai tim independen yang keanggotaannya hampir tidak melibatkan dan memosisikan Penyuluh Agama di tingkat lokal yang "seharusnya" lebih memahami persoalan. Padahal, Penyuluh Agama di tingkat lokal sangat penting untuk dilibatkan dalam upaya penanganan konflik. Dengan demikian, idealnya,

apabila Penyuluh Agama di tingkat lokal lebih memahami akar persoalan dan mampu merekonstruksi konflik-konflik berbasis agama serta mampu menjadi katalisator pada saat dan paska konflik, maka penanganan konflik lokal tidak perlu diselesaikan di tingkat pusat.

Namun demikian, persoalan ini muncul kemungkinan dikarenakan tiga hal. Pertama, keterbatasan jumlah penyuluh, sehingga tidak mampu mengcover area dan persoalan konflik. Kedua, keterbatasan pengetahuan dan kapasitas kemampuan sebagai katalisator konflik sehingga merasa rendah diri untuk mengambil peran terdepan dalam resolusi konflik. Ketiga, rendahnya kepercayaan publik terhadap keberadaan penyuluh akibat buruknya citra organisasi.

Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji tiga persoalan pokok:

- a. Memaparkan persepsi Penyuluh Agama terhadap konflik berbasis agama di daerahnya
- b. Menganalisis posisi Penyuluh Agama selama konflik berlangsung dan sesudahnya, serta peran mereka dalam penyelesaian konflik berbasis agama atas dasar persepsi mereka tentang konflik.
- c. Menganalisis pengetahuan, sikap dan tindakan Penyuluh Agama terhadap konflik berbasis agama dalam upaya membentuk citra organisasi Kementerian Agama.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana persepsi Penyuluh Agama terhadap timbulnya konflik berbasis agama
2. Mengetahui *positioning* dan peran Penyuluh Agama selama konflik berlangsung

3. Mengetahui pengetahuan, sikap, tindakan serta penguasaan wilayah Penyuluh Agama terhadap konflik yang berbasis agama dalam upaya membentuk citra organisasi Kementerian Agama

Kerangka Teoritik

Pemerintah melalui Kantor Kementerian Agama di daerah memiliki tugas memahami peta wilayah dan sosial khususnya untuk wilayah-wilayah rawan konflik sosial, sehingga diperlukan *performance* organisasi dan anggotanya dalam merespons persoalan-persoalan aktual. Berdasarkan teori tentang sinyal, terdapat kemungkinan bahwa perilaku *citizenship* organisasi akan memberi sinyal-sinyal tentang identitas sosial kepada publik internal maupun eksternal. Karena perilaku-perilaku tersebut mencerminkan nilai-nilai dan norma yang lebih dikehendaki secara sosial, maka publik internal maupun eksternal dapat membentuk citra yang disukai tentang organisasi. Dengan demikian, ada kemungkinan ketika anggota organisasi menyadari tentang aktifitas-aktifitas sosial organisasi, mereka akan berpikir bahwa hal tersebut akan mengirimkan sinyal yang baik kepada stakeholder eksternal.

Sebagian reputasi dan citra suatu organisasi dipengaruhi oleh pengetahuan tentang tindakan organisasi tersebut sehubungan dengan pengembangan isu-isu politik dan sosial dan stakeholder rekanannya. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa kesadaran atau pengetahuan anggota organisasi tentang perilaku *citizenship* organisasinya (seperti keterlibatan dalam masyarakat dan tindakan pengamanan lingkungan) akan mempengaruhi persepsi tentang prestis eksternal, juga akan secara langsung mempengaruhi persepsi anggota tentang citra internal, karena perilaku *citizenship*

yang ditunjukkan organisasi akan memberi sinyal kepada anggota tentang nilai-nilai organisasi (Greening dan Turban, 2000). Intinya, komunikasi aktif tentang perilaku *citizenship* dari organisasi akan meningkatkan kesadaran anggota organisasi tentang perilaku tersebut dan akan menghargainya.

Pemikiran John Wahlke, tentang teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Ia membedakan peran berdasarkan pada aktor yang memainkan peranan tersebut, yaitu peran yang dimainkan oleh aktor politik dan peran oleh suatu badan atau institusi (Mas'od, 1989). Ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Sedangkan ia mendeskripsikan peranan institusi secara behavioral, dimana model teori peran menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Kerangka berpikir teori peran juga memandang individu sebagai seorang yang bergantung dan bereaksi terhadap perilaku orang lain.

Respons masyarakat terhadap Penyuluh Agama dan pengetahuan serta kemampuan penyuluh, sangat tergantung dari persepsi masyarakat. Kotler (2000) menjelaskan persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Dengan cara yang sama persepsi dapat dikatakan sebagai proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan (Arindita, 2002). Karena menangkap sebuah gejala, maka persepsi mencakup penafsiran obyek, penerimaan stimulus (input), pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap.

Adapun Robbins (2003) mendeskripsikan persepsi dalam kaitannya dengan lingkungan, yaitu sebagai proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Dengan demikian, persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi [lingkungan](#) mereka. Disinilah kemudian muncul persepsi yang lebih selektif di mana individu menginterpretasikan secara selektif apa yang dilihat seseorang berdasarkan [minat](#), latar belakang, [pengalaman](#), dan [sikap](#) seseorang (Robbins, 2007).

Ketiadaan penyuluh dalam ruang-ruang konflik, bisa jadi akibat dari persepsi masyarakat itu sendiri terhadap penyuluh, karena persepsi berarti analisis mengenai cara mengintegrasikan penerapan masyarakat terhadap hal-hal di sekeliling mereka dengan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada, dan selanjutnya mengenali respons tersebut. Atau sebaliknya, Karena persepsi yang dibangun penyuluh tentang konflik wilayah, bukan merupakan bagian penting dari tugas dan wewenangnya.

Proses persepsi dengan sendirinya merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu (Mar'at, 1991). Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur bagi objek yang ditangkap panca indera, sedangkan pengetahuan dan cakrawala akan memberikan arti terhadap objek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu terhadap objek yang ada. (Hamka, 2002) menyatakan bahwa terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut:

- a. Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia.
- b. Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui saraf-saraf sensoris.
- c. Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor.
- d. Tahap ke empat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku.

Persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, misalnya sikap, kebiasaan, dan kemauan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi stimulus itu sendiri, baik sosial maupun fisik (Thoha, 1993). Dijelaskan oleh Robbins (2003) bahwa meskipun individu-individu memandang pada satu benda yang sama, mereka dapat mempersepsikannya berbeda-beda. Ada sejumlah faktor yang bekerja untuk membentuk dan terkadang memutarbalikkan persepsi. Faktor-faktor ini dari:

- a. Pelaku persepsi (perceiver)
- b. Objek atau yang dipersepsikan
- c. Konteks dari situasi dimana persepsi itu dilakukan.

Berbeda dengan persepsi terhadap benda mati seperti meja, mesin atau gedung, persepsi terhadap sistem adalah

kesimpulan yang berdasarkan tindakan orang yang berada dalam sistem tersebut. Objek yang tidak hidup dikenai hukum-hukum alam tetapi tidak mempunyai keyakinan, motif atau maksud seperti yang ada pada manusia. Akibatnya individu akan berusaha mengembangkan penjelasan-penjelasan mengapa berperilaku dengan cara-cara tertentu. Oleh karena itu, persepsi dan penilaian individu terhadap sistem akan cukup banyak dipengaruhi oleh pengandaian-pengandaian yang diambil mengenai keadaan internal sistem itu (Robbins, 2003). Persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor belajar, motivasi, dan pemerhati perseptor atau pemersepsi ketika proses persepsi terjadi (Hapsari, 2004). Karena ada beberapa faktor yang bersifat subyektif yang mempengaruhi, maka kesan yang diperoleh masing-masing individu akan berbeda satu sama lain.

(Hamka, 2002) membagi empat karakteristik penting dari faktor-faktor pribadi dan sosial yang terdapat dalam persepsi, yaitu:

- a. Faktor-faktor ciri dari objek stimulus.
- b. Faktor-faktor pribadi seperti intelegensi, minat.
- c. Faktor-faktor pengaruh kelompok.
- d. Faktor-faktor perbedaan latar belakang kultural.

Persepsi individu dipengaruhi oleh faktor fungsional dan struktural. Faktor fungsional ialah faktor-faktor yang bersifat personal. Misalnya kebutuhan individu, usia, pengalaman masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan hal-hal lain yang bersifat subjektif. Faktor struktural adalah faktor di luar individu, misalnya lingkungan, budaya, dan norma sosial sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan

sesuatu. Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal, yaitu faktor pemersepsi (*perceiver*), obyek yang dipersepsi dan konteks situasi persepsi dilakukan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua wilayah kasus konflik, yakni Ahmadiyah di Kecamatan Parakansalak dan Tijani versi Sumarna di Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian yang bersifat kualitatif ini, menggunakan wawancara mendalam dan FGD terhadap Penyuluh Agama yang berposisi sebagai PNS dan Penyuluh Agama Honorer yang secara berkala diangkat oleh Kemenag Kab/ko. FGD berlangsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi.

Hasil dan Pembahasan

Sosial Demografis Sukabumi

Dengan luas wilayah 3.934,47 km, Kabupaten Sukabumi merupakan Kabupaten terluas di Pulau Jawa. Batas wilayah [Kabupaten](#) Sukabumi 40 % berbatasan dengan lautan dan 60% merupakan daratan. Wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki areal yang relatif luas yaitu ± 419.970 ha. Beberapa puncak gunung terdapat di bagian utara, diantaranya: [Gunung Halimun](#) (1.929 m), [Gunung Salak](#) (2.211 m), dan yang tertinggi adalah [Gunung Gede](#) (2.958). Di antara sungai yang mengalir adalah [Sungai Cilandir](#) dan [Sungai Cikaso](#), yang bermuara di Samudra Hindia. Kabupaten Sukabumi terdiri atas 47 [kecamatan](#), yang dibagi lagi atas sejumlah 364 [desa](#) dan 3 [kelurahan](#).

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukabumi

Tahun	2011	2010	2009	2008	2006
Jumlah Laki-laki	1.214.769	1.191.489	1.167.580	1.158.964	716.672
Jumlah Perempuan	1.168.681	1.147.859	1.126.162	1.118.056	676.896
Total	2.383.450	2.339.348	2.293.742	2.277.020	1.393.568
Pertumbuhan Penduduk (%)	-	2	-	-	-
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)	-	6.112	-	6.139	6.566

Kabupaten Sukabumi dengan Sunda sebagai mayoritas, memiliki komposisi penduduk berdasar agama sebagai berikut. Penduduk beragama Islam (99,53%), Kristen (0,44%), Hindu (0,02%), dan Budha (0,01%). Di bidang sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Sukabumi memiliki PAUD sebanyak 2.036 buah, TK 217 buah, SD 1.190 buah, MI 305 buah, SMP 215 buah, MTs 194 buah, SMA 56 buah, SMK 69 buah, dan MA : 71 buah. Untuk bidang keagamaan terdapat mesjid 5.308 buah, gereja : 13 buah, dan hanya 1 buah vihara. Kabupaten Sukabumi memiliki 56 Penyuluh Agama PNS (PA PNS) dan 440 Penyuluh Agama Honorer (PAH).

Sekilas Konflik: Ahmadiyah dan Tijani

Ahmadiyah di Parakan Salak. Minggu, 27 April 2008, tepatnya pukul 22.00 WIB, sejumlah massa berdatangan di depan masjid Al-Furqon milik jemaat Ahmadiyah di Kampung Parakansalak, RT 02/RW 02 Desa/Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Mereka berorasi mengancam keberadaan Ahmadiyah selama satu jam. Massa terus berdatangan. Jumlah mereka mencapai 500 orang. Sementara jumlah polisi hanya 6 personil. Massa bergerak secara bergerilya bergerak mendekati masjid Al-Furqon. Sekitar pukul 00.30 WIB (Senin dini hari) massa yang sudah

berkumpul kemudian melemparkan botol-botol berisi minyak tanah dan bensin dalam keadaan menyala. Botol-botol tersebut mengarah ke atap dan teras masjid dan menyebabkan api menyala dimana-mana, merembet ke seluruh bagian masjid. Seiring membesarnya kobaran api, massa yang emosi itu tak henti-hentinya berteriak sambil sesekali mengumandangkan nama Tuhan: "Allahu Akbar...Allahu Akbar!!!". Hanya dalam sekejap, masjid terbesar milik jemaat Ahmadiyah di Sukabumi itu pun hangus dilumat api. Selain membakar Masjid Al-Furqon, massa merusak tiga bangunan madrasah yang berada di samping masjid dan membuat ratusan warga jemaah Ahmadiyah terkocar-kacir.

Di dalam masjid, sebanyak 30 eksemplar mushaf kitab suci Al-Quran terbitan Kementerian Agama hangus terbakar. Kaca jendela bangunan madrasah (sekolah agama) terkena lemparan batu, termasuk rumah Ustaz Kasmir Mubarok, salah satu jemaat Ahmadiyah yang berada persis di sebelah madrasah. Karena diberi pembatas polisi, Ustadz Kasmir Mubarok dan keluarganya tidak bisa masuk ke rumahnya. Salah satu anak Kasmir yang saat ini duduk di kelas tiga SLTP, yang akan melaksanakan ujian nasional, tidak dapat mengambil pakaian dan peralatan sekolah lainnya.

Pembakaran masjid Al-Furqon merupakan puncak dari emosi sebagian warga setempat yang sejak awal tidak menghendaki keberadaan Ahmadiyah. Kemarahan ini diperkuat dengan keluarnya rekomendasi Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan (Bakor Pakem). Tiga hari sebelum kejadian pembakaran masjid, pada hari jumat 25 April 2008, di desa Curug Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi, dilakukan musyawarah Umat Islam Se Wilayah III Sukabumi usai ibadah shalat Jumat dan Istighotsah.

Musyawarah itu menghasilkan

lima butir himbauan yang tertuang dalam surat keputusan bersama. Salah satu himbauan itu menyatakan bahwa Musyawarah Umat Islam se Wilayah III Sukabumi, mengajak jemaat Ahmadiyah supaya taubat atau kembali kepada ajaran Islam dan menghentikan segala aktivitas peribadatan di markas yang berada di Kampung Parakansalak RW 02, Desa/ Kecamatan Parakansalak, Sukabumi itu.

"Tuntutan terakhir kami meminta agar segala keputusan warga ini dijalankan dalam tempo dua hari," tegas Ketua Forum Komunikasi Jamaatul Mubalighin, Endang Abdul Karim, di Sukabumi, Senin (28/4/2008). Surat itu juga menegaskan, "apabila tidak mengindahkan himbauan ini, maka (kami) tidak bertanggungjawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan".

Usai acara, mereka langsung menyerahkan surat tersebut ke Muspika Parakansalak. Pada hari yang sama, Muspika Kecamatan Parakansalak yang terdiri dari Camat Parakansalak, Danramil Parakansalak (Parmono), Kapolsek Parakansalak (Suratman Adnan) menyerahkan surat tersebut ke Ketua Ahmadiyah Parakansalak, Asep Saepudin pada pukul 21.00 WIB. Usai menerima surat, pihak Ahmadiyah langsung melaporkan kepada Intel dan meminta agar dilakukan penjagaan dan pengawasan untuk menangkai segala kemungkinan buruk.

Terhitung sejak dibuatnya keputusan tersebut, sejak minggu pagi, warga masih menyaksikan aktivitas peribadatan di sekitar markas Ahmadiyah. Atas dasar itu, warga akhirnya secara brutal melakukan aksi pembakaran masjid dan merusak bangunan madrasah. (<http://www.desantara.or.id/06-2008/449/satu-lagi-then-masjid-ahmadiyah-di-sukabumi-dibakar>, diunduh, 29 Nopember 2012).

Tijani di Jampan Tengah (Pos Kota) – Sebuah padepokan Tharekat At-Tijaniyah di Kampung Cisolopa, Desa Bojongtipar, Kecamatan Jampantengah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat nyaris dihancurkan massa, Kamis (16/8/2012) malam. Penyebabnya, kelompok yang dipimpin Sumarna ini kendati sudah dinyatakan sesat oleh MUI setempat diduga masih terus menyebarkan aliran menyimpang dari syariat Islam.

Beruntung aksi massa ini berhasil diredam ratusan petugas gabungan dari Polri dan TNI. Untuk menghindari aksi massa petugas terpaksa mengevakuasi sedikitnya 138 pengikut aliran At-Tijaniyah ini ke Gedung Islamic Center di Kecamatan Cisaat, Jumat (17/8/2012). Kendati tidak ada korban jiwa, massa sempat merusak dan membakar sebuah saung padepokan dan menggulingkan sebuah mobil milik anggota aliran sesat tersebut.

Pada Jumat pagi, seratusan lebih pengikut aliran sesat ini telah kembali ke kediamannya masing-masing. Mayoritas dari mereka bukan asli warga Cisolopa melainkan dari sejumlah daerah, seperti Bogor, Tangerang dan wilayah lainnya. Hanya sekitar 30 orang warga Kampung Cisolopa yang hanya dievakuasi.

Informasi yang dihimpun, aksi massa ini dipicu karena warga merasa kesal dengan ulah kelompok At-Tijaniyah. Pasalnya, mereka sudah mengetahui aliran yang diajarkan dalam kelompok itu sesat. “Kelompok ini sudah dinyatakan sesat oleh MUI dan sudah membubarkan diri. Kenyataannya mereka masih melaksanakan aktifitasnya sehingga menyebabkan warga masyarakat marah dan meminta kepada pemerintah agar kelompok ini dibubarkan sebagaimana disuarakan oleh Ali Mukti, salah seorang warga masyarakat. Menurut Ali Mukti, aktifitas kelompok tersebut sudah ada sejak dua tahun yang lalu. Namun

ajaran Sumarna, pimpinan At-Tijaniyah yang memiliki pandangan bahwa sholat Jum’at tidak perlu dilakukan serta dapat mengganti waktu sholat subuh dengan sholat dhuha merupakan ajaran menyimpang dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

“Yang kami tahu pengikutnya dari Bogor. Kita sekali minta ditegaskan. Kami sudah kesal dengan ulah mereka. Dan kami minta pimpinannya diproses secara hokum,” tegas Ali diamini warga lainnya. Kapolres Sukabumi, AKBP M Firman mengakui permasalahan ini dipicu karena warga kesal dengan aktifitas kelompok ini. Sebelumnya, kata Firman, MUI telah menyatakan aliran ini sesat karena meniadakan salat Subuh dan Jumat. “Diduga para anggota aliran ini masih beraktifitas sehingga memancing amarah warga. Kita mengevakuasi pengikut aliran At-Tijaniyah ke sebuah tempat yang aman,” tandasnya. (<http://www.poskotanews.com/2012/08/17/138-pengikut-aliran-at-tijaniyah-dievakuasi/>, Diakses 29 Nopember 2012).

Profil Informan Penyuluh Agama

Semua informan telah menjadi penyuluh di atas 2 tahun. Bahkan 3 orang informan penyuluh telah bekerja selama 7 tahun. Ini membuktikan bahwa secara umum, informan penyuluh telah banyak memahami tugas dan fungsi mereka. Pendidikan mereka adalah sarjana agama, dan hanya seorang Penyuluh Agama Honorer yang berpendidikan SMA. Dengan demikian, dari sisi pendidikan para penyuluh memiliki kompetensi yang relatif cukup baik secara kualitatif, meskipun hanya sebagian di antara mereka yang memiliki basis pendidikan pesantren.

Sebagai komunikator agama, tidak semua penyuluh berperan aktif dalam organisasi, baik sosial maupun agama. Hanya 1 orang penyuluh aktif di FKUB, 1 orang aktif di NU, dan 2 orang penyuluh aktif dalam organisasi sosial seperti Gabungan Persaudaraan Pemuda Muslim dan Perkumpulan "Kematian" Kecamatan. Aktifitas dalam organisasi massa ataupun agama, pada dasarnya mampu mendekatkan mereka lebih intens kepada masyarakat, namun hal ini jarang dilakukan karena berbagai alasan. Jawaban dan alasan mereka diantaranya: "Sudah lelah mengurus rumah", "Tidak sempat", "Agar dapat diterima oleh kelompok manapun", atau "Saya harus bersikap netral", dan alasan ekonomi sebab keterlibatan dalam organisasi akan membawa konsekuensi ekonomi.

Berdasarkan penjelasan sebagian besar Penyuluh Agama Honorer yang peneliti wawancarai, gaji sebulan yang diterima setiap 3 bulan sekali sebesar Rp 150.000,00 tanpa disertai fasilitas lain, menjadikan profesi penyuluh agama bukan cita-cita, kecuali sekedar ibadah. Menurut mereka, "Jangankan motor, fasilitas apapun tidak pernah kami terima. Maka terkadang kami merasa iri dengan penyuluh dari instansi lain sebagaimana diperoleh penyuluh pertanian dan KB." Minimnya fasilitas ini menjadi pemicu utama, mengapa Penyuluh Agama, baik PNS maupun honorer seringkali bekerja dengan motivasi yang rendah, meskipun demikian mereka tetap harus menjaga semangat tinggi.

Semangat berbeda dengan motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam definisi ini adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Tingkat motivasi seorang penyuluh memiliki

pengaruh terhadap tingkat kerjanya. Faktor motivasi memiliki hubungan langsung dengan kinerja

individual penyuluh. Namun demikian, semangat lebih didorong oleh posisi yang harus ditanggung sebagai beban. Sehingga meskipun bekerja dengan keterbatasan, yang terpenting adalah semangat mengabdikan dan ikhlas karena Allah Swt.

Potret lain tercermin dari pendapat Munip yang telah mengabdikan sebagai penyuluh selama 4 tahun, semula adalah guru sebuah madrasah negeri. Dia memandang pekerjaan sebagai penyuluh lebih memiliki tantangan. Oleh karena itu, pada tahun 2008 ia mengundurkan diri sebagai guru, kemudian menjadi penyuluh meskipun pernah terbersit untuk kembali menjadi guru namun dirinya tidak mendapat rekomendasi. Munip memang sedikit menyesal karena ketika guru mendapat program sertifikasi, ia tidak mendapat rekomendasi untuk kembali menjadi guru, namun demikian pilihannya menjadi penyuluh merupakan kepuasan tersendiri untuk dapat memberikan "sesuatu" kepada masyarakat.

Kata "ikhlas" pada praktiknya memang tidak mudah, namun kondisi yang dihadapi penyuluh, telah membentuk sikap "ikhlas" sebagai sebuah kondisi yang "harus" menjadi pendorong semangat bekerja. Terlebih faktor lingkungan dan keluarga menjadi variabel penting dalam menjaga "semangat" sebagai penyuluh, khususnya penyuluh perempuan.

Persepsi Penyuluh tentang Konflik

Ada 2 persoalan konflik yang dijadikan sebagai stimulus dalam riset ini, yakni konflik Ahmadiyah di Kecamatan Parakansalak dan konflik Tijaniyah di Kampung Cisalopa Kecamatan Jampang Tengah. Konflik di Parakansalak terjadi pada sebuah masjid milik jemaah Ahmadiyah ketika Senin, 28 April 2008 tepatnya pada dini hari sekitar pukul 00.30

WIB dibakar ratusan massa tidak dikenal, bahkan satu unit sekolah juga terkena dampak amuk massa. Sedang konflik Tijaniyah terjadi di sebuah padepokan Tharekat At-Tijaniyah di Kampung Cisalopa, Jampang Tengah, pada hari Kamis malam, tanggal 16 Agustus 2012. Penyebabnya, kelompok yang dipimpin Sumarna ini kendati sudah dinyatakan sesat oleh MUI setempat diduga masih terus menyebarkan aliran menyimpang dari syariat Islam.

Semua penyuluh, baik penyuluh PNS maupun honorer mengetahui persoalan konflik lokal yang terjadi disana, bahkan beberapa di antaranya memahami sejarah konflik lokal tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar informan umumnya sudah bekerja sebagai penyuluh lebih dari 2 tahun sehingga mengetahui dan memahami sejarah kedua konflik tersebut. Namun demikian, tidak semua penyuluh mengetahui akan terjadinya konflik, bahkan bagian besar tidak memiliki pengetahuan tentang kemungkinan akan munculnya konflik. Keterangan ini diperoleh berdasarkan penuturan salah seorang Penyuluh Agama Honorar di Jampang Tengah, Sukabumi, yang menyatakan bahwa dirinya sebelumnya tidak mengetahui akan terjadi konflik, karena keadaan di desa berjalan seperti biasanya, tidak ada tanda-tanda akan muncul konflik. Bahkan pengajian sebelumnya berjalan dengan biasa. Disamping itu terdapat alasan lain yang tergambar dari temuan lapangan yaitu tidak semua penyuluh tinggal di desa atau kecamatan yang sama sehingga tidak mengetahui peristiwa yang terjadi secara spontan tersebut.

Sedangkan mengenai peristiwa pembakaran masjid Ahmadiyah, diperoleh keterangan lain dari salah seorang Penyuluh Agama Honorar disana bahwa dia sebetulnya sudah memiliki firasat akan terjadinya konflik. Tetapi dia hanya bisa membicarakan hal tersebut

dengan keluarga dan belum memiliki keberanian untuk mengatakannya kepada teman-teman dan atasan di kantor serta kepada tokoh masyarakat. (Wawancara dengan Penyuluh Agama Honorar Perempuan di Parakansalak, Sukabumi).

Dari temuan lapangan tergambar bahwa rendahnya pengetahuan tentang "deteksi dini" konflik, setidaknya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, para penyuluh tidak memiliki metode memahami peta kerawanan sosial, kecuali dalam batas "pengetahuan" mereka yang tidak terstruktur. Kedua, tidak ada "permintaan" atau keharusan melakukan pemetaan kerawanan sosial dan agama oleh Kantor Kementerian Kabupaten. Keterangan tersebut merupakan penjelasan sebagian informan di lapangan. Ketiga, lemahnya posisi penyuluh dalam lingkaran birokrasi di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kenyataan tersebut tergambar dari pernyataan salah seorang Penyuluh PNS yang sudah bekerja 9 tahun sebagai penyuluh. Menurutnya, terkadang dirinya melakukan pembinaan yang diselenggarakan sebulan sekali di kantor tetapi terkadang kantor bersikap diam. Sementara apabila terjadi peristiwa, penyuluhlah yang disalahkan.

Selanjutnya, munculnya persepsi yang "negatif" tentang konflik, bukan berarti persoalan konflik dipersepsi secara negatif oleh informan, tetapi lebih dikarenakan respons yang apatis terhadap konflik yang pada gilirannya akan menghasilkan tindakan apatis terhadap konflik. Selama proses "menjadi penyuluh", mereka sebenarnya melakukan proses persepsi terhadap lingkungan, pekerjaan, fasilitas, dan kebutuhan-kebutuhan birokrasi. Ketika informan menangkap dan memproses persepsi melalui lima indera, disanalah terjadi proses pemaknaan dan seleksi, yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menilai apa yang mereka

terangkap dalam proses bekerja menjadi Penyuluh Agama. Sehingga persepsi bukan hanya bersifat stimulus melainkan proses aktif yang memegang peranan dalam menanggapi stimulus. (Walgito, 1993). Penyuluh dalam hubungannya dengan dunia luar selalu melakukan pengamatan untuk dapat mengartikan rangsangan yang diterima dan alat indera dipergunakan sebagai penghubung antara individu dengan dunia luar. Agar proses pengamatan itu terjadi, maka diperlukan objek yang diamati alat indera yang cukup baik dan perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan pengamatan. Perhatian yang negatif terhadap peristiwa konflik yang ditandai dengan respons yang bersifat apatis menghasilkan kinerja yang negatif pula di kemudian hari.

Persepsi berarti analisis mengenai cara mengintegrasikan penerapan tugas sebagai Penyuluh Agama terhadap hal-hal di sekitar mereka dengan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada, dan selanjutnya mengenali respons tersebut. Untuk memahami hal ini, akan diberikan contoh sebagai berikut. Memahami konflik bukan "sesuatu" yang dianggap penting karena "kantor" tidak pernah menuntut mereka dalam tugas-tugasnya sebagai Penyuluh Agama. Walaupun beberapa di antara mereka sadar, namun kesadaran itu hanya tersimpan dalam pikiran-pikirannya. Akibatnya, ketika konflik terjadi, mereka "tidak segera" melakukan respons, dan sebagian besar lebih memilih sikap menunggu "esok hari" setelah beberapa organ pemerintah melakukan tindakan.

Padahal Alport (dalam Mar'at, 1991) menyebutkan bahwa proses persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur bagi

objek yang ditangkap panca indera, sedangkan pengetahuan dan cakrawala akan memberikan arti terhadap objek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu terhadap objek yang ada.

Posisi Penyuluh Agama dalam Masyarakat dan Konflik

Dibanding penyuluh bidang pertanian dan keluarga berencana, fasilitas yang diperoleh Penyuluh Agama jauh lebih minimal, untuk tidak mengatakan "tidak ada" sama sekali. Setidaknya, alat transportasi diberikan kepada kedua jenis penyuluh. Secara kuantitatif, jumlah penyuluh yang memperoleh fasilitas tersebut jumlahnya tidak banyak. Mengenai hal tersebut, Apipuddin, salah seorang penyuluh PNS mengatakan: "Jangankan sepeda motor, sekedar uang bensin saja tidak. Padahal kami selalu menjelaskan kepada masyarakat soal haji. Haji kan ada dananya. Kemudian belum lagi ikut berpartisipasi menggalang zakat untuk BAZ. Kemudian soal perkawinan. Pokoknya hampir semua program Kementerian Agama dibebankan kepada penyuluh."

Bahkan beberapa penyuluh keluarga berencana seringkali meminta bantuan Penyuluh Agama, terutama untuk menemukan dalil-dalil agama dalam pembinaan keluarga. Bantuan kepada mereka sama sekali tidak pernah disertai kontribusi apapun, meskipun tugas-tugas tersebut selalu dilaksanakan oleh Penyuluh Agama.

Terkait dengan beberapa institusi yang berhubungan dengan konflik, posisi Penyuluh Agama relatif lemah. Sebagian besar mereka, cenderung "lambat" dalam hal merespons konflik. Hal ini tergambar dari kutipan wawancara berikut: "Awalnya cukup terkejut,

kami cek dan recek kepada teman-teman, apakah betul konflik Tijaniyah terjadi di kecamatan kami. Ternyata betul. Kemudian, besok paginya kami berkunjung ke lokasi dan berkordinasi dengan teman-teman penyuluh yang lain." (Wawancara dengan Penyuluh Agama Honorer di Jampang Tengah, Sukabumi). Dalam kasus Ahmadiyah, respons serupa terjadi: "Langsung saya paginya berangkat dan menanyakan kepada orang-orang yang tahu persis". (Wawancara dengan Penyuluh Agama Honorer di Parakansalak, Sukabumi).

Bahkan ada yang sama sekali tidak melakukan apapun. "Hanya mendengar cerita dari orang lain, tidak ada yang saya lakukan". (Wawancara dengan beberapa informan). Dalam konteks ini, tugas utama Penyuluh Agama hanyalah melaporkan secara tertulis tentang peristiwa yang terjadi, dan hal yang sama biasanya sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Polsek setempat. "Kalau hal keamanan, memang tugas utama polisi", "Biar laporannya satu atap dan satu versi". (Wawancara dengan beberapa informan). Namun kenyataan ini berbeda ketika dikonfirmasi ke kepolisian lokal. "Mereka datang hanya menanyakan kasus, lalu mencatatnya, selesai. Jarang ikut serta dalam penanganan secara bersama. Tapi memang terus terang kadang mereka kami minta juga untuk mengisi pengajian kecil yang kadang kami laksanakan" (Wawancara dengan Kemitraan Serse Polsek setempat). Penjelasan senada dikemukakan oleh salah satu pejabat eselon III di Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri: "Saya sering nongkrong di warung-warung kopi dengan Kapolres, Dandim, FKUB pada kasus konflik bernuansa agama, seperti Yasmin, Ciketing, atau Ahmadiyah. Tetapi tidak pernah ada orang Kemenag di sana. Maaf, ini saya bicara apa adanya" (Pernyataan Pejabat Eselon III Kesbangpol Kemendagri pada saat Seminar Peran Pemda dalam Kerukunan

Umat Beragama, 10 Desember 2012 di Hotel Merlyn).

Kenyataan di lapangan, ketika masyarakat mengalami konflik, justru masyarakat datang ke tokoh agama, dan beberapa di antara mereka berkedudukan sebagai Penyuluh Agama Honorer. "Jadi posisinya justru masyarakat lebih mengenal dia sebagai tokoh agama, bukan sebagai penyuluh." (Wawancara dengan beberapa anggota masyarakat). Aktivitas Penyuluh Agama memang memiliki fokus untuk kegiatan-kegiatan lokal, yang bersifat religius, seperti pengajian, arisan yang diisi pengajian, atau peringatan-peringatan hari besar agama di beberapa masjid dan mushola. Namun yang menjadi persoalan adalah tidak semua penyuluh tinggal di kecamatan di mana dia bertugas. "Jarak rumah saya masih 2 jam ke sini", "Saya tidak tinggal di kecamatan ini". (Wawancara dengan Penyuluh Agama). Faktor inilah yang antara lain menyebabkan posisi Penyuluh Agama, khususnya yang PNS tidak begitu dikenal dalam relasi sosial sehari-hari, kecuali untuk kelompok tertentu, misalnya majelis taklim atau kelompok pengajian dan arisan. Persoalan geografis ini pula yang menjadi salah satu pemicu lemahnya respons Penyuluh Agama terhadap konflik lokal.

Ketiadaan beberapa "fasilitas" kemungkinan besar merupakan indikasi penting, bagaimana Penyuluh Agama mengalami posisi yang inferior. "Kalau Penyuluh KB, dulu sering memutar film karena mereka punya fasilitas mobil keliling", "Kalau pertanian, kan hasilnya jelas, bisa terlihat. Kalau penyuluh agama kan tidak"; "Tunjangan kami (-PAH) juga sangat kecil dibanding mereka" (FGD dengan informan).

Secara umum memang posisi Penyuluh Agama, berada dalam tekanan horizontal dan vertikal. Secara horizontal, Penyuluh Agama "dipersepsi" oleh diri "mereka" sendiri secara kurang

baik. Kecemburuan sosial sebagaimana tergambar dari penjelasan di atas menjadi menarik, ketika dijadikan cara pandang dalam bekerja. Dalam beberapa kasus kecemburuan tersebut dapat “menghambat” motivasi. Kecemburuan sosial tidak hanya terjadi dalam suatu lingkup keluarga tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kecemburuan sosial merupakan sebuah perasaan dalam hati tentang keraguan dan ketidaksenangan terhadap sesuatu tanpa alasan yang jelas. Hal ini terjadi berawal dari rasa iri seseorang kepada orang lain karena status sosial mereka lebih tinggi daripada dirinya, sehingga timbul rasa cemburu. (Abdullah, 2001). Cemburu sosial juga merupakan proses psikologi yang menjadi pemicu berbagai perilaku kontra-produktif. Selain disebabkan variabel internal, kecemburuan sosial pun timbul dari kekuatan-kekuatan eksternal. Hal ini tergambar dari kutipan berikut: “Bagaimana pembinaan, setiap datang, dikumpulkan, isinya hanya dimarahin. Tidakdiberimotivasi”(Wawancara dengan informan). “Kesejahteraan penyuluh perlu diperhatikan, tunjangannya parah dibanding dengan bagian-bagian lain di Kementerian Agama. Apalagi dibanding para penyuluh di kementerian lain”(Pernyataan ini berkembang dalam FGD dengan informan).

Terkait dengan persoalan *positioning* penyuluh, jelas bahwa sesungguhnya *positioning* penyuluh dengan sendirinya ada dalam sebuah konsep *social well being*, yakni kondisi seseorang dimana dia dapat memperoleh kualitas hidup dalam lingkungan sosialnya. Ada 5 hal yang dapat dilihat dalam konteks ini, yakni penerimaan sosial (*social acceptance*), aktualisasi sosial (*social actualization*), kontribusi sosial (*social contribution*), hubungan sosial (*social coherence*), dan integrasi sosial (*social integration*), di mana indikator ini dapat menjadi acuan evaluasi tentang kemampuan atau pencapaian individu untuk menghadapi

tugas atau peran sosial dalam struktur sosial dan komunitasnya (Larsen dan Eid, 2008). Kelima hal ini tampak relatif lemah dimiliki oleh penyuluh, apalagi jika secara kasuistik mereka dihadapkan pada tokoh-tokoh agama lokal di Sukabumi, yang memiliki kharisma sosial lebih baik di mata masyarakat.

Sikap dan Tindakan Penyuluh Agama

Tidak ada tindakan yang terencana dan terstruktur pada saat dan pasca konflik berlangsung. Semua terjadi secara sporadis. “Saya berkoordinasi dengan Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat”. (Wawancara dengan informan). Kata kordinasi menjadi penting namun sulit dioperasionalkan, kecuali ketika para Penyuluh Agama membuat laporan tertulis, berdasarkan laporan aparat keamanan, terutama Polsek setempat seperti kutipan hasil wawancara berikut: “Biasanya mereka justru meminta laporan kejadian dari kami”(Wawancara dengan Kanit Serse di kedua Kepolisian Sektor setempat). Kordinasi merupakan retorika birokrasi, karena masih memerlukan kebijakan yang lebih operasional, karena koordinasi berbeda dengan sekedar berkomunikasi. Kordinasi yang biasa ditemukan selama riset adalah tindakan berkomunikasi.

Perbedaan pelaporan, terutama ada pada paparan dan argumentasi ajaran.

“Yang kemudian amalan jamaah dimaksud diselewengkan oleh pemikiran dan amalan pribadi saudara Sumarna yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat khususnya masyarakat sekitar, diantaranya saudara Sumarna menghilangkan ibadah Sholat Subuh dan diganti dengan Sholat Dhuha, juga menghilangkan Sholat Jum’at bagi pengikutnya.”

Awal informasi atas penyimpangan tersebut diperoleh dari Ormas GARIS dan GOIB karena dianggap ada penyimpangan dari pokok ajaran yang Al-Dharuriyah." (Dokumen Laporan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi kepada Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat mengenai Kasus Tijaniyah di Cisalopa).

Dari pelaporan tersebut tidak diperoleh indikasi kuat, bahwa laporan merupakan cara kerja dalam merespons persoalan konflik. Tidak adanya keterampilan dan pengetahuan tentang resolusi konflik pada Penyuluh Agama, mengakibatkan mereka tidak melakukan "apapun" kecuali pelaporan yang sifatnya instruktif.

Menurut Penyuluh Agama, resolusi konflik merupakan domain kepolisian, sehingga tidak ada tindakan yang perlu lebih operasional dalam peran-serta penyelesaian konflik. Sedangkan tugas Penyuluh Agama menurut beberapa informan dalam FGD, tugas Penyuluh Agama adalah memberi motivasi dan pengarahan soal agama. Pernyataan ini meskipun terjadi silang pendapat tetapi secara umum relatif mencerminkan pandangan beberapa penyuluh.

Pengetahuan yang kurang, persepsi yang lemah, tidak adanya skill, serta sikap yang inferior menyebabkan tidak adanya tindakan Penyuluh Agama terhadap resolusi konflik. Persoalan ini kemudian didorong lagi sikap yang relatif ego sektoral di antara penyuluh. Hal ini tergambar pada kutipan wawancara berikut: "Kebetulan wilayah yang rawan itu bukan binaan saya, karena di luar desa saya." (Wawancara dengan Penyuluh Agama Honorer). Kondisi semacam ini mempersulit posisi Penyuluh PNS, karena beban kerja mereka ada pada wilayah kecamatan. Semangat "korps" semacam ini dengan sendirinya menjadi hambatan tersendiri dalam upaya reaksi terhadap persoalan konflik local terlebih

kata "lokal" pada beberapa Penyuluh Agama Honorer dikonstruksi sebagai "desa" atau "kelurahan".

Persepsi penyuluh tentang keberadaan konflik lokal, dapat membentuk citra organisasi, khususnya Kementerian Agama. Meskipun istilah citra organisasi sering digunakan, namun tidak terdapat satu definisi tunggal dari istilah tersebut. Citra organisasi telah dikonseptualisasikan dalam berbagai cara, dan sering dipertukarkan dengan reputasi. Karena konsep citra organisasi sangat ambigu, beberapa ahli berpendapat bahwa citra organisasi hanya dapat didefinisikan dalam hal perspektif atau dasar ontologisnya (Corley, 2002). Para ahli tersebut seringkali menggunakan pendekatan multi-dimensional untuk mengkaji citra organisasi, serta memandang citra organisasi sebagai "seperangkat kognisi, yang meliputi keyakinan, sikap, dan kesan tentang perilaku-perilaku yang relevan dengan organisasi. Termasuk bagaimana individu berperilaku, juga senantiasa berkaitan dengan organisasi" (Treadwell & Harrison, 1994). Apa yang dilakukan seorang anggota Densus 88 dan polisi pada umumnya, dengan sendirinya menjadi konstruksi citra organisasi sekaligus.

Menurut Riordan et al. (1997), perkembangan citra organisasi merupakan fungsi dari sinyal-sinyal yang dikirimkan organisasi kepada berbagai kelompok *stakeholder*-nya. Karena setiap kelompok *stakeholder* memiliki hubungan organisasi dengan berbagai kepentingan yang berbeda, maka berbagai *stakeholder* tersebut secara selektif memproses berbagai tanda atau petunjuk informasi yang disediakan organisasi untuk menilai efektivitas organisasi tersebut dalam memuaskan kebutuhan dan kepentingannya (Riordan et al., 1997).

Penutup

Kesimpulan

Pengetahuan penyuluh agama, baik yang PNS maupun honorer, cukup baik, khususnya yang berkaitan dengan “agama”, namun tidak diikuti dengan “skill” dalam memahami struktur sosial masyarakat, terutama dalam melakukan deteksi dini kerawanan sosial. Bahkan secara faktual, mereka tidak memiliki peta kerawanan sosial, kecuali “sebatas” pengetahuan mereka yang tidak terstruktur secara tekstual. Artinya, semua fenomena konflik hanya ada dalam pengetahuan mereka, tanpa terkonsep secara tekstual. Sikap inferior, lemahnya *skill* dan minimnya fasilitas juga merupakan indikasi penting bagaimana posisi penyuluh dalam resolusi konflik tidak tampak.

Persoalan posisi penyuluh dihadapkan pada 3 hal. Pertama, sikap inferior yang diakibatkan oleh persepsi mereka tentang “reward”, fasilitas yang diterima. Kedua, posisi yang relatif lebih lemah dibanding beberapa tokoh agama lokal yang terkadang memiliki reputasi regional dan bahkan nasional di mata masyarakat. Ketiga, harapan dan beban kerja yang tidak diikuti dengan perhatian.

Rekomendasi

- a. Dibutuhkan sebuah model yang mampu menumbuhkan motivasi penyuluh:
 1. Melalui sistem insentif dan (mungkin) rekrutmen yang memadai
 2. Perhatian yang lebih focus oleh Kemenag, karena hampir semua program-program kementerian langsung ada pada penyuluh yang berhadapan dengan masyarakat.
3. Hubungan kerja antara kantor dengan posisi penyuluh dibutuhkan sebuah energi dan cara pandang baru. Misalnya dengan memberi beberapa pelatihan local, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan local. Kata “pembinaan” dibutuhkan cara pandang yang lebih kontekstual, tidak “sekedar” mengumpulkan mereka dan memberi “ceramah”.
 - b. Memberi pembekalan dan memberdayakan tentang cara melakukan pemetaan sosial-budaya masyarakat local, sehingga mampu melakukan deteksi dini konflik dalam berbagai level
 - c. Peningkatan pengetahuan tentang konflik dan resolusi konflik, jika dimungkinkan dilakukan “pelatihan” khusus terutama bagi wilayah-wilayah rawan konflik
 - d. Koordinasi dengan berbagai institusi local, misal Polsek, Koramil, Pemerintah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan serta beberapa tokoh local, perlu diterjemahkan dalam operasional yang lebih kontekstual. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi di tingkat local, sehingga kerjasama antara Kemenag Kab/Ko via penyuluh dengan institusi-institusi tersebut memiliki kekuatan hukum.
 - e. Diperlukan pendekatan yang lebih mendalam untuk menjaring PA lebih luas dalam melihat 5 hal, yakni penerimaan sosial (*social acceptance*), aktualisasi sosial (*social actualization*), kontribusi sosial (*social contribution*), hubungan sosial (*social coherence*), dan integrasi sosial (*social integration*). Dengan cara ini akan ditemukan “terapi” yang lebih tepat bagaimana meningkatkan kemampuan sosial PA dalam masyarakat untuk menunjang tugas-tugas Kementerian Agama di tingkat paling bawah dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan, 2001. "Globalisasi, Redefinisi Budaya, dan Munculnya Masyarakat Terbuka", *Terang*, Vol. I, No. 1, hal. 37-47.
- Abdullah, Taufik, 2001. "Kerawanan Sosial di Tanah Air: Sebuah Refleksi Historis", dalam Andi Syamsu Rijal (ed), *Kumpulan Makalah Diskusi Sejarah Lokal*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Arindita, S. 2003. Hubungan antara Persepsi Kualitas Pelayanan dan Citra Bank dengan Loyalitas Nasabah. Skripsi (tidak diterbitkan). Surakarta: Fakultas Psikologi UMS.
- Gerungan, W. A. 1996. Psikologi Sosial. (edisi kedua). Bandung : PT Refika Aditama.
- Greening, D.W., & Turban, D.B. 2000. Corporate social performance as a competitive advantage in attracting a quality workforce. *Business & Society*, 39(3), 254 – 280.
- Hamka, Muhammad. 2002. Hubungan Antara Persepsi Terhadap Pengawasan Kerja dengan Motivasi Berprestasi. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Fakultas Psikologi. Tidak diterbitkan.
- Kotler, Philip. 2000. Marketing Manajemen: Analysis, Planning, implementation, and Control 9th Edition, Prentice Hall International, Int, New Jersey.
- Larsen, R.J dan M. Eid, 2008. *The Science of Subjective Well Being*, New York: Guilford Publication.
- Mar'at, 1991. Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mas'ood, Mohtar, 1989. *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisa dan Teorisa*, Universitas Gadjah Mada.
- Robbins, Stephen P. 2003. Perilaku Organisasi. Jilid I. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia.
- Rosyadi, I. 2001. Keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui capabilities-based competition: Memikirkan kembali tentang persaingan berbasis kemampuan. *Jurnal BENEFIT*, vol. 5, No. 1, Juni 2001. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sutherland, Heather, Remco Raben, dan Elsbeth Locher-Scholten, 2002. "Rethinking Regionalism: Changing Horizons in Indonesia 1950s-2000s", dalam Henk Schulte Nordholt dan Irwan Abdullah (eds.), *Indonesia in Search of Transition*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soros, George, 2000. *Open Society : Reforming Global Capitalism*, New York: Vintage Books.
- Walgito, Bimo. 2003. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset